

PENGHARGAAN YAP THIAM HIEN

Keamanan Tak Harus Abaikan HAM

JAKARTA, KOMPAS — Ketika ancaman teroris masih membayangi, negara berpotensi meminta agar sebagian kebebasan dan hak asasi manusia ditunda pelaksanaannya atau sama sekali diabaikan. Ini tidak seharusnya terjadi. Pentingnya keamanan bukan berarti harus melepaskan hak asasi manusia.

"Mendamaikan keamanan dengan hak asasi manusia adalah tantangan kekinian kita," ujar Ketua Yayasan Yap Thiam Hien, Todung Mulya Lubis, dalam acara malam penganugerahan penghargaan Yap Thiam Hien 2015 kepada Handoko Wibowo, di Jakarta, Rabu (20/1).

Yap Thiam Hien (1913-1989) merupakan advokat yang getol membela HAM. Penghargaan Yap Thiam Hien diberikan tiap tahun sejak 1992 kepada mereka yang berdedikasi, berani, dan konsisten di bidang pembelaan HAM. Handoko Wibowo adalah aktivis dan pendamping petani dari Batang, Jawa Tengah, yang telah puluhan tahun berjuang mendampingi korban konflik pertanahan.

Pernyataan Todung tentang pentingnya HAM merujuk pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia tidak setuju dengan revisi karena undang-undang yang ada sudah bagus. Permasalahannya tinggal koordinasi yang efektif di antara aparat penegak hukum.

“

**Handoko Wibowo
adalah aktivis dan
pendamping petani dari
Batang, Jawa Tengah..**

Todung melanjutkan, kepentingan menjaga stabilitas dan keamanan serta kepentingan memperluas rasa hormat terhadap HAM sering bertemu, tetapi juga sering berseteru. Keadaan ini sering disebut sebagai dinamika berbangsa.

"Namun, jika memang demikian, seyogianya dinamika itu haruslah lebih memperluas wilayah hormat terhadap HAM oleh negara, bukan sebaliknya," tambahnya.

Jalan di tempat

Selain itu, Todung juga menyoroti penegakan HAM yang saat ini jalan di tempat. "Kita tidak maju dan juga tidak mundur," katanya.

Sejumlah kebijakan pemerintah memang menunjukkan adanya empati keberpihakan terhadap pemenuhan HAM, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan asuransi kesehatan wajib melalui Badan Pe-

nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, di sisi lain, pemerintah masih belum memenuhi janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus itu antara lain tragedi 1965, kasus Tanjung Priok, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta kasus di Aceh dan Papua.

Sejarah, lanjut Todung, tak akan bisa menghilangkan hari-hari gelap masa lalu. Sejarah tak akan bisa menyembunyikan kejahatan meski dibungkus dengan segala macam pembenaran.

Ketua Komisi Nasional HAM Nur Kholis juga melihat belum adanya penegakan HAM yang signifikan, terutama dalam hal pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ketika negara masih belum sempurna menegakkan HAM, dia menekankan pentingnya keberadaan aktivis HAM seperti Handoko Wibowo.

Sementara itu, Handoko mengatakan, penghargaan Yap Thiam Hien akan dijadikan bagian dari kampanyenya kepada kawan-kawan pergerakannya yang saat ini mengalami stagnasi.

"Saya tidak akan berhenti berjuang setelah dapat penghargaan ini. Perjuangan belum usai. Perjuangan mengembalikan hak tanah petani dalam konflik tanah, perjuangan menyejahterakan petani butuh waktu lama, saya sendiri di Batang butuh waktu hingga 18 tahun. Saya akan keliling seluruh Indonesia untuk terus memperjuangkan itu," tutur Handoko. (APA)